

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KOTA LANGSA¹

*THE EFFECT OF GENERAL ALLOCATION FUNDS AND SPESICAL
ALLOCATION FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURE WITH ECONOMIC
GROWTH AS MODERATING VARIABLE IN LANGSA CITY.*

Tuti Meutia², Afrah Junita³, Imelda Husna⁴

Email: tuti_meutia@unsam.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted to know the effect of the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund on Capital Expenditures with Economic Growth as a Moderating variable. The results of this study indicate that: (1) General Allocation Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures (2) Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures (3) General Allocation Funds have no significant effect on Capital Expenditures with Economic Growth as a Moderating variable (4) Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures with Economic Growth as a Moderating variable (5) General Allocation Funds and Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures (6) General Allocation Funds and the Special Allocation Fund has a positive and significant effect on Capital Expenditure with Economic Growth as a Moderating variable.

Keywords: *Capital Expenditure, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Economic Growth*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal (2) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal (3) Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal dengan variabel Moderasi Pertumbuhan Ekonomi (4) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dengan variabel Moderasi Pertumbuhan Ekonomi (5) Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal (6) Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Moda dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Moderasi.

¹ Diterima 07 September, Direvisi 22 September 2022

² Universitas Samudra, Langsa, Indonesia, 24416

³ Universitas Samudra, Langsa, Indonesia, 24416

⁴ Universitas Samudra, Langsa, Indonesia, 24416

Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi

A. PENDAHULUAN

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat, karena pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah”. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa “daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya kedalam belanja modal”. Menurut Darwanto dan Yustikasri (2007) “belanja modal ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Diharapkan investasi modal mampu meningkatkan kualitas layanan publik, dikarenakan aset tetap yang dimiliki merupakan akibat adanya belanja modal.”

Setiap dana alokasi umum yang diterima oleh daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka dari itu tidak jarang jika pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja yang cenderung optimis agar transfer dana alokasi umum yang diterima daerah bisa lebih besar. Abdullah dan Halim (2006) menemukan bahwa “pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi yang terbesar adalah dana alokasi umum”. “Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi dana

alokasi umum terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk pendapatan asli daerah” (Adi, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, “Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam pemanfaatan dana alokasi khusus pemerintah mengarahkan pada kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik yang tentunya demi meningkatkan dan menunjang pelayanan publik yang lebih baik lagi. Adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan merupakan tanda adanya pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota”.

Otonomi daerah selain terjadi karena adanya penyerahan tugas dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah juga disertai dengan pelimpahan wewenang agar dapat mengelola pemerintahannya sendiri. Dengan berlakunya otonomi daerah, diharapkan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah tersebut, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan anggaran belanja modal.

“Belanja modal memiliki peran sangat penting di dalam pemerintah daerah karena dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan untuk

kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui pengoptimalan potensi pendapatan daerah dengan memberi proporsi alokasi belanja modal yang lebih tinggi kepada sektor-sektor yang dianggap produktif (Mulyani, 2017).”

Kota Langsa merupakan salah satu kota otonomi dalam wilayah Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2001 tanggal 21 juni 2001 dan peresmiannya dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Kota Langsa merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang terletak paling ujung dari Provinsi Aceh dan merupakan kota sebagai pintu gerbang keluar masuknya barang dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.
Data Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Kota Langsa (Dalam Rupiah)

Tahun	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Belanja Modal
2013	381.240.982.000	29.920.830.000	63.891.887.609
2014	419.767.005.000	32.355.330.000	149.334.377.367
2015	425.446.753.000	60.351.491.000	174.548.981.891
2016	451.951.928.000	145.033.111.052	294.379.982.765
2017	444.012.586.000	162.357.964.616	333.296.714.479

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dana Alokasi Umum diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah

Pusat agar mampu mengatasi ketimpangan antar daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Langsa juga terus meningkat setiap tahunnya. Dana Alokasi Khusus diberikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus suatu daerah yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Peningkatan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak secara langsung meningkatkan Belanja Modal secara signifikan, tetapi Belanja Modal di Kota Langsa terus meningkat setiap tahunnya.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu priode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto di Kota Langsa memiliki jumlah berbeda-beda, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pengelolaan potensi daerah yang belum maksimal, selain itu jumlah penduduk yang bervariasi serta luas wilayah masing-masing yang berbeda-beda pula. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini digunakan untuk mengetahui kemampuan sumberdaya ekonomi, pergeseran dan ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi”.

STUDI PUSTAKA

Belanja Modal

“Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap serta aset

lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi” (Halim, 2007:101). “Kategori belanja modal menurut Halim (2007:105) sebagai berikut: (1) Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah daerah; (2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah; (3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.”

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, “Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (penerimaan dari minyak dan gas, penerimaan pajak serta penerimaan dari non migas dan non pajak) di alokasikan ke Dana Alokasi Umum (DAU).

Undang-Undang Nomor 25 Thn 1999 menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada daerah berdasarkan potensi ekonomi dan kebutuhan belanja daerah masing-masing. Jadi, daerah yang potensinya besar namun kebutuhannya relatif kecil akan memperoleh alokasi yang sedikit”. Sebaiknya, daerah yang memiliki potensi kecil, tapi kebutuhannya besar akan mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum besar dan seterusnya.

Menurut Mardiasmo (2002:142) “beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU kepada pemerintah daerah yaitu: (1) untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah, (2) untuk meningkatkan akuntabilitas, (3) untuk meningkatkan sistem pajak yang progresif, dan (4) untuk meningkatkan pajak daerah”.

Dana Alokasi Khusus

Darise (2007:102) menyatakan bahwa “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)”.

Menurut Deddi, et.al (2007:58) “daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria umum yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah, kriteria khusus yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah, dan kriteria teknis yang disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK yang dirumuskan melalui indeks teknis”.

Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai pendanaan pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan khusus yang

dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah daerah untuk mengalokasikannya dalam bentuk program-program pemerintah atas kegiatan khusus yang menjadi wewenang dari pemerintah sebagai prioritas nasional. "Penggunaan Dana Alokasi Khusus lebih diarahkan pada kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perawatan infrastruktur jalan, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik disuatu daerah yang menjadi prioritas nasional" (Rasyid, 2006).

Halim (2001:58) menyatakan "bahwa tujuan dari penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan IPM yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan. Hal ini dikarenakan besarnya tingkat kemiskinan yang ada di daerah".

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2010), "pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang". Perkembangan akan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya.

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan melalui peningkatan secara fisik

terhadap produksi barang/jasa yang berlaku di suatu negara. Peningkatan tersebut terlihat dari penambahan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, produksi barang modal dan sektor jasa.

Setiap negara berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal demi membawa bangsanya kepada kehidupan yang lebih baik. Setiap pemerintah mengukur keberhasilan perekonomian negaranya dengan berbagai metode atau indikator yang paling representatif terhadap perubahan perekonomiannya. Hal tersebut tentu untuk mengetahui unjuk kerja elemen pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan.

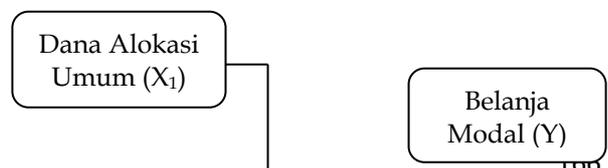
"Pertumbuhan ekonomi sering diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB), akan tetapi indikator ini dianggap tidak selalu tepat di karenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain yaitu pendapatan per kapita sering digunakan mengukur pertumbuhan ekonomi ini" (Gasperz dan Feonay, 2003).

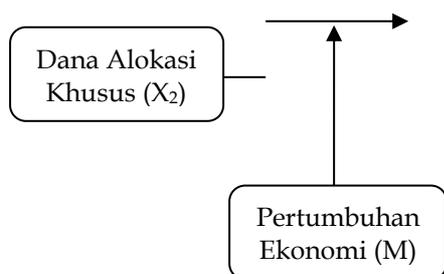
KERANGKA KONSEPTUAL

Dari tinjauan penelitian sebelumnya dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1 seperti berikut.

Gambar 1.

Kerangka Konseptual





HIPOTESIS

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- H₁ : Dana Alokasi Umum berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal
- H₂ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal
- H₃ : Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
- H₄ : Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
- H₅ : Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal
- H₆ : Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kuantitatif berupa Laporan Realisasi APBD di Kota Langsa Tahun 2003-2017 dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB atas dasar harga konstan).

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan periode tahun 2003-2017.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berupa angka atau bilangan yang diolah dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) versi 23.

Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3.M + \beta_4 X_4.M + e$$

Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Parsial)
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
2. Uji F (Simultan)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
3. Uji Koefisien Determinasi (R²)
Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 2.
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Dana Alokasi Umum (X ₁)	Darwanto, et.al (2007) menyatakan bahwa "Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran didalam rangka pelaksanaan desentralisasi".	DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF) Keterangan: AD: Gaji PNS Daerah CF: Kebutuhan Fiskal- Kapasitas Fiskal	Rasio
Dana Alokasi Khusus (X ₂)	Darise (2007:102) menyatakan bahwa "Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)".	Kemampuan Keuangan Daerah =Penerimaan Umum APBD - Belanja Pegawai Daerah Dimana: Penerimaan Umum- PAD + DAU + (DBH - DBHDR) -Belanja Pegawai Daerah -Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.	Rasio
Belanja Modal (Y)	Syaiful (2008) menyatakan bahwa "belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset".	Belanja modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi (M)	Menurut Sukirno (2010), "pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat".	$G_t = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan: G _t = Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau tahunan) PDB (t) = Produk Domestik Bruto periode t (berdasarkan harga konstan) PDB (t-1) = Produk Domestik Bruto periode sebelumnya.	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.
Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-8.069	3.337		-2.418	.032
DAU	.604	.220	.372	2.742	.018
DAK	.712	.153	.633	4.668	.001

Tabel 4.
Hasil Regresi Moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.557	2.151		6.303	.000
DAU_PE	-.009	.020	-.211	-.455	.657
DAK_PE	.043	.018	1.107	2.393	.034

Sumber: Data diolah, 2020.

Persamaan regresi yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = -8,069 + 0,604DAU + 0,712DAK - 0,009DAU_PE + 0,043DAK_PE + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan:

1. Nilai konstanta -8,069 memiliki arti apabila DAU dan DAK tetap, maka Belanja Modal akan menurun sebesar -8,069.
2. Nilai koefisien regresi DAU sebesar 0,604 memiliki arti apabila DAU naik sebesar satu satuan, maka Belanja Modal naik sebesar 0,604 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.
3. Nilai koefisien regresi DAK sebesar 0,712 memiliki arti apabila DAK naik sebesar satu satuan, maka Belanja Modal naik sebesar 0,712 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4. Nilai koefisien regresi DAU_PE sebesar -0,009 mengindikasikan

bahwa efek moderasi yang diberikan adalah negatif, artinya semakin tinggi moderasi Pertumbuhan Ekonomi, maka pengaruh DAU terhadap Belanja Modal menurun.

5. Nilai koefisien regresi DAK_PE sebesar 0,043 mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif, artinya semakin tinggi moderasi Pertumbuhan Ekonomi, maka pengaruh DAK terhadap Belanja Modal meningkat.

Hasil Uji t (Parsial)

1. Dana Alokasi Umum memiliki nilai t hitung sebesar 2,742 > t tabel sebesar 2,179 dengan tingkat signifikan sebesar 0,018 yang berada lebih kecil dari $\alpha=0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Belanja Modal dan hipotesis pada penelitian ini dapat diterima.
2. Dana Alokasi Khusus memiliki nilai t hitung sebesar 4,668 > t tabel sebesar 2,179 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 yang berada lebih kecil dari $\alpha=0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Belanja Modal dan hipotesis pada penelitian ini dapat diterima.
3. Variabel moderasi pertama antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Dana Alokasi Umum memiliki nilai t hitung sebesar -0,455 < t tabel sebesar 2,179 dengan tingkat signifikan sebesar 0,657 yang berada lebih besar dari $\alpha=0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum terhadap

alokasi Belanja Modal dan hipotesis pada penelitian ini di tolak.

- Variabel moderasi pertama antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Dana Alokasi Khusus memiliki nilai t hitung sebesar $2,393 > t$ tabel sebesar $2,179$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,034$ yang berada lebih kecil dari $\alpha=0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Modal dan hipotesis pada penelitian ini di terima.

Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	12.823	2	6.412	86.549	.000 ^b
Residual	.889	12	.074		
Total	13.712	14			

a. Dependent Variable: BM
 b. Predictors: (Constant), DAK, DAU

Tabel 6. Hasil Uji Simultan Moderasi (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	11.255	2	5.627	27.474	.000 ^b
Residual	2.458	12	.205		
Total	13.712	14			

a. Dependent Variable: BM
 b. Predictors: (Constant), DAK_PE, DAU_PE

Sumber: Data diolah, 2020.

- Analisis uji simultan memiliki nilai F hitung sebesar 86.549 dengan nilai signifikan $0,000$. Karena nilai signifikan $< \alpha (0,05)$ sehingga variabel dalam penelitian ini mempunyai pengaruh simultan terhadap Belanja Modal.
- Analisis uji simultan dalam penelitian ini memiliki nilai F hitung sebesar 27.474 dengan nilai signifikan $0,000$. Karena nilai signifikan $< \alpha$

$(0,05)$ sehingga variabel dalam penelitian ini mempunyai pengaruh simultan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi.

Hasil Uji Koefisien Determinansi (R²)

Uji koefisien determinansi (R^2) yang bertujuan untuk menguji sejauh mana tingkat keterkaitan variabel Dana Alokasi Umum (X_1) dan Dana Alokasi Khusus (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi di Kota Langsa yang dapat dilihat dari nilai koefisien determinansi (*adjusted R-square*) berikut:

Tabel 7. Uji Koefisien Determinansi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.967 ^a	.935	.924	.27218

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU

Tabel 8. Uji Koefisien Determinansi Moderasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.906 ^a	.821	.791	.45257

b. Predictors: (Constant), DAK_PE, DAU_PE

Sumber: Data diolah, 2020.

Nilai R Square pada persamaan regresi pertama sebesar $0,935$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini berpengaruh terhadap Belanja Modal sebesar $93,5\%$. Sedangkan pada regresi kedua dengan variabel moderasi sebesar $0,821$ atau $82,15\%$ sedangkan dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, yang berarti H_1 diterima. Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten/kota yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mulyani (2017) yang mengatakan “bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal karena diharapkan dengan adanya dana bantuan tersebut pemerintah daerah semakin banyak mengalokasikannya belanja modal demi menyediakan pelayanan publik yang memadai”. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014) yaitu “Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang mengatakan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat”.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal, yang berarti H_2 diterima. Mulyani (2017) menjelaskan bahwa “kabupaten/kota yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Selain itu juga berindikasi bahwa belanja modal akan sangat dipengaruhi oleh sumber penerimaan DAK. Pemanfaatan DAK dapat dilakukan melalui kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan

prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaannya fisik penunjang. Pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik”. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sianipar (2011) menunjukkan hasil bahwa “DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal”. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Merina dan Sari (2015), yaitu “DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dikarenakan penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda”.

Hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum pada alokasi belanja modal, yang berarti H_3 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunantara (2014) yang mengatakan “bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum pada Belanja modal karena pemerintah daerah kurang maksimal pada saat melakukan studi kelayakan atas proyek fasilitas publik dan melakukan analisis investasi publik, hal tersebut dilakukan agar pengerjaan proyek tersebut memang benar-benar tepat guna sehingga tidak mubasir dan mangkrak dikemudian hari selain itu juga pengelolaan fasilitas publik yang dibangun tidak dimanfaatkan secara

maksimal. Pemerintah daerah harus memperhatikan permasalahan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengelola operasional dari fasilitas yang dibangun, hal ini perlu dilakukan agar tujuan dibangunnya fasilitas publik tersebut dapat tercapai.”

Hubungan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Khusus pada belanja modal, yang berarti H_4 diterima. Mulyani (2017) menyatakan bahwa “belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana, fasilitas serta infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Jika suatu daerah telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan mengurangi pengalokasian belanja modalnya dan menggunakan DAK tersebut untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional lainnya selain belanja modal. Hal ini karena tujuan pemerintah daerah melakukan belanja modal yaitu untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi sudah tercapai”. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan tetapi memperlemah pengaruh antara DAK pada belanja modal. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh DAK pada belanja modal semakin meningkat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal yang berarti H_5 diterima. Sugiarti dan Supadmi (2014) menjelaskan bahwa “pemanfaatan belanja modal hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan seperti pembuatan jalan, gedung dan jembatan. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik, karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal”. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2013) menunjukkan bahwa “Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal”. Berdasarkan beberapa penelitian ini maka mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.

Hubungan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi dapat memperkuat hubungan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan berpengaruh terhadap belanja modal yang berarti H_6 diterima. Menurut Mulyani (2017) “semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pemerintah daerah akan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana untuk

mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan cara meningkatkan belanja modal. Sehingga pemerintah daerah membutuhkan sumber dana yang lebih baik untuk meningkatkan alokasi belanja modal tersebut". "Salah satu sumber dana tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi" (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Penelitian yang dilakukan Sugiardi dan Supadmi (2014) menunjukkan bahwa "pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) pada belanja modal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan sumber dana dan belanja modal. Karena pemerintah akan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik".

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. Hal ini berarti Dana Alokasi Umum mempengaruhi alokasi Belanja Modal di Kota Langsa.

2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. Hal ini berarti Dana Alokasi Khusus mempengaruhi alokasi Belanja Modal di Kota Langsa.
3. Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. Hal ini berarti Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kota Langsa.
4. Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. Hal ini berarti Pertumbuhan di Kota Langsa mempengaruhi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kota Langsa.
5. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. Hal ini berarti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Modal di Kota Langsa.
6. Pertumbuhan Ekonomi secara simultan dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. Hal ini berarti Pertumbuhan Ekonomi dapat mempengaruhi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kota Langsa.

Saran

Saran dari penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah daerah diharapkan untuk terus dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya.

2. Pemerintah daerah diharapkan untuk terus dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang diperoleh guna membangun infrastruktur publik seperti jembatan dan jalan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
4. Pemerintah daerah diharapkan untuk terus dapat memanfaatkan Dana Alokasi Khusus yang diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana.
5. Adanya pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada belanja modal di Kota Langsa disebabkan jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat.
6. Adanya pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada belanja modal melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Langsa karena ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

REFERENSI

Abdullah, Syukriy dan Halim, Abdul, 2006, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan, **Jurnal Akuntansi Pemerintah**, Vol. 2 No. 2.

- Adi, Priyo Hari. 2006. **Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah**. Simposium Nasional Akuntansi, Agustus 2006.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, **Jurnal SNA X, Makassar**.
- Darise, Nurlan. 2007, **Pengelolaan Keuangan Daerah**, PT INDEKS.
- Gaspersz, Vincent dan Esthon Feonay, 2003, Kinerja Pendapatan Ekonomi Rakyat dan Produktivitas Tenaga Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, **Jurnal Ekonomi Rakyat**, Th. II - No. 8 - Nopember 2003.
- Halim, Abdul. 2001. **Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Andi. Yogyakarta.
- Mulyani, Sri, 2017, **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi**, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sukirno, Sadono, 2010. **Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan**. Jakarta: Kencana.
- Sugiarti dan Supadmi, 2014. Pengaruh PAD, DAU dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. **E-Jurnal Akuntansi Universitas**

- PENGARUH ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KOTA LANGSA •

Udayana 7(2): 477-495, ISSN: 2302-8556.

Syaiful, 2006. **Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan.**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. **Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 **tentang Dana Alokasi Umum.**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 **tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 **tentang Pemerintahan Daerah.**